

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PROMOTOR DAN KO PROMOTOR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PENGUJIAN TAHAP I (TERTUTUP).....	v
LEMBAR PENGUJIAN TAHAP II (TERBUKA)	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRACT.....	xiv
RINGKASAN	xv
SUMMARY	xxi
DAFTAR ISI.....	xxv
DAFTAR ATURAN HUKUM.....	xxix
DAFTAR TABEL.....	xxxvi
DAFTAR BAGAN	xxxvii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan dan Orisinalitas Penelitian.....	13
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	13
1.3.2. Orisinalitas Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	19
1.4.1. Manfaat Teoritikal.....	19
1.4.2. Manfaat Praktikal.....	20
1.5. Metode Penelitian.....	20
1.5.1. Tipe Penelitian.....	20
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	21
1.5.3. Bahan Hukum.....	23
1.5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	24
1.6. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II. LANDASAN FILOSOFI PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN

2.1. Kewenangan Pemerintah Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan	27
2.2. Kewenangan Pemerintah Ditinjau Dari Asas-asas Dan Norma Hukum Administrasi	41
2.3. Pemberian Izin Pertambangan Dalam Asas <i>Goed Bestuur</i>	45
2.3.1. Peraturan Per-undang-undangan	49
2.3.2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	51

2.3.3. Pemberian Izin Tidak Boleh Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.....	53
2.3.4. Kepemerintahan Yang Baik <i>Good Governance</i>	56
2.4. Hakikat Kewenangan Sebagai Pemberi IUP.....	62
2.5. Karakteristik Kewenangan Pemerintah Dalam Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	77

BAB III. FORMULASI NORMA KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMEBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

3.1. Fungsi dan Wewenang Pemerintah Dalam Pemberian IUP.....	86
3.1.1. Pengertian Wewenang.....	102
3.1.2. Sumber Wewenang Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan.....	105
3.2. Bentuk-bentuk Izin IUP, IUPK, dan IPR.....	113
3.2.1 Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	113
3.2.2 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).....	115
3.2.3. Izin Usaha Pertambangan (IPR).....	116
3.3. Prosedur Pemberian IUP, WIUPK dan IPR.....	117
3.3.1. Prosedur Pemberian IUP.....	117
3.3.2. Prosedur Pemberian WIUPK.....	123
3.3.3. Prosedur Pemberian IPR.....	129
3.3.4. Berakhirnya IUP dan IUPK.....	130
3.3.5. Alur Proses Pengajuan IUP.....	132
3.4. Prinsip <i>Good Governance</i> (GG) Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan.....	139
3.4.1. Prinsip Transparansi.....	143
3.4.2. Prinsip Kecermatan.....	146
3.4.3. Prinsip Proporsionalitas.....	149
3.4.4. Prinsip Akuntabilitas.....	152
3.5. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan.....	155
3.6. Maladministrasi Dalam Konteks Pemberian Izin Usaha Pertambangan.....	160
3.6.1. Definisi Maladministrasi.....	174
3.6.2. Parameter Maladministrasi.....	194
3.6.3. Parameter Maladministrasi Pemberian IUP.....	200
3.7. Penegakan Hukum Administrasi Bagian dari Wewenang Pemerintah.....	207

BAB IV. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA

4.1. Ketentuan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan.....	212
4.1.1. Perumusan Delik Dalam Ketentuan Pidana UU No.4 Tahun 2009	217
4.1.2. Unsur Delik Setiap Orang.....	224
4.1.3. Unsur Delik Menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Pidana UU Minerba....	231
4.1.4. Unsur Delik Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberian IUP.....	251
4.2. Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan Merupakan Tindak Pidana Khusus.....	260
4.3. Ketentuan Pidana di Bidang Pertambangan Sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	266
4.4. Maladministrasi Pemberian Izin Pertambangan Sebagai Kejahatan (<i>Functionele Dader</i>) Korporasi (<i>Corporation</i>).....	271
4.5. Kebebasan Bertindak Yang Berpotensi Melanggar Norma (Umum, Administrasi dan Tindak Pidana).....	280
4.5.1. Pelanggaran Norma Pejabat Berwenang Dalam Menerbitkan IUP.....	295
4.5.2. Pelanggaran Administrasi Dalam Pemberian IUP.....	304
4.5.3. Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pemberian IUP.....	309
4.6. Aspek Melanggar Hukum Terkait Kewenangan Pemerintah (Penyalahgunaan Wewenang).....	323
4.7. Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Oleh Pejabat Berwenang Dalam Pemberian IUP.....	334
4.7.1. Pendekatan Dalam Hukum Administrasi.....	336
4.7.2. Pendekatan Kekuasaan.....	338
4.7.3. Pendekatan Hak Asasi Manusia.....	340
4.7.4. Pendekatan Perilaku.....	342
4.8. Tanggung Jawab atau Tanggung Gugat Negara.....	346
4.8.1. Konsep <i>Responsibility</i> Dan <i>Liability</i>	347
4.8.2. Konsep <i>Individual Responsibility</i>	350
4.8.3. Konsep <i>State Liability</i> (<i>Governmental Liability</i>).....	354
4.8.4. Kesalahan Pribadi (<i>Faute Personelle</i>).....	355
4.8.5. Kesalahan Jabatan (<i>Faute de Service</i>).....	358
4.8.6. Legalitas Tindak Pemerintahan Dalam Menerbitkan IUP.....	365
4.9. Niat dan Kemampuan (<i>Personality</i>) Aparat Yang Menggunakan Kewenangan Pemerintah.....	370
4.10. Maladministrasi Pemberian IUP Dalam Konteks <i>Administrative Penal Law</i> (<i>Verwaltungsstrafrecht</i>).....	395

4.10.1. Konsep <i>Administrative Penal Law</i>	397
4.10.1.1. Instrumen Hukum.....	397
4.10.1.2. Karakter Yuridis.....	399
4.10.1.3. Asas Hukum	401
4.10.2. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi.....	404

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	408
5.2. Saran.....	412

DAFTAR BACAAN



DAFTAR ATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Burgerlijk Wetboek, Stb. 1847-23.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Berita Republik Indonesia II Nomor 9.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Lembaran Negara 1960-104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 362.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4154.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Penghasilan tambang Negara dan Penghasilan tambang Daerah yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Untuk Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.

KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1366.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian.

SURAT EDARAN

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan/alasan

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 09 P/HUM/2012.
Tanggal Dibacakan 12-09-2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 P/HUM/2012.
Tanggal Dibacakan 12-09-2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 207 K/TUN/2012
Tanggal Dibacakan 31-05-2012

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 08 PK/TUN/2011
Tanggal Dibacakan 2011

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 208 K/TUN/2010
Tanggal Dibacakan 2010

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 06/G/2009/ PTUN.SMD.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 07/PID/B/TPK-2011.PN PDG.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 227/PID.B/2012/PN.SMD.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 01 /TIPIKOR/ 2013/
Pengadilan Tinggi SULTRA

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Perbedaan Antara Wewenang Delegasi Dan Wewenang Mandat..	108
Tabel II .	Mekanisme Perizinan Terkait Dengan Dinas Lain.....	161
Tabel III.	Perbandingan Jenis Tindak Pidana Dalam UU No. 11 Tahun 1967 Batubara dan Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	255
Tabel IV.	Perbandingan Antara Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi.....	278
Tabel V.	Tanggung Jawab Jabatan Berkaitan Dengan Keabsahan Tindakan Atau Keputusan Dan Tanggung Jawab Pribadi Berkaitan Dengan Tindakan Perorangan.....	356
Tabel VI.	Parameter Tanggung Jawab Jabatan dan Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Pemberian Izin Usaha Pertambangan.....	357
Tabel VII.	Maladministrasi dalam Bentuk Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Pemberian Usaha Pertambangan.....	364
Tabel VIII..	Pembedaan <i>Nietig, van Rechtswegenietig</i> Dan <i>Vernietigbaar</i>	369

DAFTAR BAGAN

Bagan Alir I.	Proses Permohonan IUP/IUPK Eksplorasi Pada WIUP/WIUPK Kewenangan Pemerintah.....	134
Bagan Alir II.	Proses Permohonan IUP/IUPK Eksplorasi pada WIUP Kewenangan Provinsi.....	135
Bagan Alir III.	Proses Permohonan IUP/IUPK Eksplorasi pada WIUP Kewenangan Kabupaten/Kota.....	137
Bagan IV.	Hubungan Asas Legalitas, Asas Spesialitas, dan AAUPB.....	313

